

**PRIBUMISASI PEKERJAAN SOSIAL:  
Sebuah Upaya Dekolonialisasi Teori  
dan Praktek Pekerjaan Sosial**



Ro'fah, dkk.

**PASCASARJANA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PRIBUMISASI PEKERJAAN SOSIAL:**

Sebuah Upaya Dekolonialisasi Teori  
dan Praktek Pekerjaan Sosial

Yogyakarta: November 2014  
vi + 192 hlm, 16 x 24,5 cm.  
© Hak cipta pada penulis 2014

Penulis:

Ro'fah, Adi Fahrudin, Pajar Hatma Indra Jaya, Zainudin, Lathiful  
Khuluq, Zulkipli Lessy, Sriharini, Soni A. Nulhaqim, Siti Napsiyah  
Ariefuzzaman, dan Andayani

Tata letak: Maryono

Editor: Ro'fah

Design Cover: Muttakhidul Fahmi

Diterbitkan oleh:

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281  
Telp. 0274 519709, Faks. 0274 557978  
Website <http://pps.uin-suka.ac.id>  
E-Mail: [pps@uin-suka.ac.id](mailto:pps@uin-suka.ac.id)

ISBN: 978-602-72084-9-0

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

**KATA PENGANTAR**

**K**ritik terhadap dominasi budaya barat pada teori dan pendekatan yang dipakai dalam disiplin ilmu kesejahteraan social (*social work*) sudah muncul semenjak dekade 1970 an. Ini kemudian memunculkan gerakan indigenisasi atau pribumisasi pekerjaan social pada konteks negara-negara berkembang, yang sebenarnya juga merupakan bagian dari fenomena indigenisasi dalam ilmu-ilmu sosial lain. Dalam tiga decade terakhir wacana mengenai pribumisasi sudah menjadi isu penting dalam pekerjaan social dan menjadi tema dari berbagai buku, seminar dan penelitian.

Namun dalam konteks Indonesia, isu ini banyak dilirik oleh akademisi maupun praktisi pekerja sosial, meski mungkin praktek pribumisasi sudah dilakukan dalam program dan intervensi masalah-masalah sosial. Berangkat dari pemikiran tersebut, program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan seminar yang berjudul **Pribumisasi Pekerjaan Sosial: Sebuah Upaya Dekolonialisasi Teori Dan Praktek Pekerjaan Sosial**. Seminar ini dimaksudkan untuk lebih dari sekedar membincangkan "wacana", tetapi lebih jauh lagi, mengidentifikasi sejauh bagaimana sebenarnya upaya pribumisasi dan kontekstualisasi praktek pekerjaan social sudah dilakukan. Dari kacamata UIN, pribumisasi pekerjaan sosial memiliki urgensi yang lebih dalam karena tuntutan upaya integrasi interkoneksi yang menjadi *core values* UIN Sunan Kalijaga dalam pengembangan keilmuannya. Karena itu isu agama, Islam, pada khususnya dan pekerjaan sosial menjadi bagian yang penting dalam seminar dan buku ini.

Di tengah langkanya diskusi tentang pribumisasi pekerjaan sosial di Indonesia, buku ini diharapkan bisa memperkaya wacana. Namun lebih pentingnya, semoga tulisan-tulisan dalam buku ini mampu menggairahkan kembali langkah dan upaya ilmuwan dan praktisi pekerjaan sosial Indonesia, untuk meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap ilmu dan praktek pekerjaan sosial. Dari kacamata praktis, semoga buku ini bisa menjadi rujukan untuk menformulasikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Akhirnya, atas terbitnya buku ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA., para penulis (kontributor) yang telah bersedia meluangkan waktunya, dan kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak ikut membantu terbitnya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk para pembaca sekalian.

Selamat membaca!

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Pendahuluan</b> .....	1
<b>Bagian Satu:</b>	
<b>Pribumisasi dalam Teori dan Praktek</b> .....	7
1. Indigenisasi Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial <i>Oleh Adi Fahrudin</i> .....	9
2. Antara Pribumisasi dan Emansipatoris Kompleksitas Dekolonialisasi Metodologi dalam Kajian Disabilitas <i>Oleh Ro'fah</i> .....	23
3. Pendekatan Dan Strategi Alternatif Pembangunan Indonesia <i>Oleh Pajar Hatma Indra Jaya</i> .....	39
<b>Bagian Dua:</b>	
<b>Pribumisasi dalam Dimensi Spiritualitas</b> .....	53
1. Kesejahteraan Sosial dan Tradisi Agama: Perspektif Islam dan Kristen <i>Oleh Zainudin</i> .....	55
2. Perlindungan Perempuan: Perspektif Keislaman dan Keindonesiaan <i>Oleh Lathiful Khuluq</i> .....	65

3. Health Care Practice in The Islamic Philanthropy Narratives Of Recipients At Rumah Bersalin Gratis Yogyakarta <i>Oleh Zulkipli Lessy</i> .....	83
--	----

**Bagian Tiga:**

<b>Pribumisasi Dalam Dimensi Masalah Sosial</b> .....	105
---	-----

1. Pribumisasi Dalam Manajemen Bencana (Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat Korban Untuk Kesuksesan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) <i>Oleh Sriharini</i> .....	107
2. Adaptasi Pekerjaan Sosial dengan Budaya Lokal <i>Oleh Soni A. Nulhaqim</i> .....	131
3. Pribumisasi Pekerjaan Sosial Pada Lansia di Indonesia <i>Oleh Siti Napsiyah Ariefuzzaman</i> .....	149
4. Pribumisasi Diskursus Kesehatan Mental <i>Oleh Andayani</i> .....	171

<b>Biodata Penulis</b> .....	189
------------------------------	-----

**PENDAHULUAN**

**Ro'fah**

*(Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)  
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga)*

Bagaimana relevansi teori dan praktek pekerjaan sosial (*social work*) dalam konteks negara-negara non-Barat? Pertanyaan ini muncul pertama kali ketika PBB melakukan survey terhadap pendidikan pekerja sosial pada tahun 1971 (Walton & Abo El Nasr, 1988). Secara implisit, pertanyaan tadi ingin menggaris bawahi bahwa teori- teori yang diusung dalam disiplin pekerjaan sosial dinilai "sangat Amerika", dan karenanya, tidak tepat untuk diaplikasikan dalam konteks negara-negara Timur yang memiliki latar belakang budaya, nilai, dan kondisi sosial-politik yang berbeda. Inilah yang kemudian memunculkan diskusi indigenisasi – disebut juga pribumisasi dalam tulisan ini -- pekerjaan sosial pada awal dekade 1970-an. Sebagaimana banyak di singgung dalam berbagai literatur, pekerjaan sosial merupakan bidang kajian yang diimpor ke negara-negara berkembang bersamaan dengan arus kolonialisasi pada abad 20. Tidak heran jika disiplin dan praktek pekerjaan sosial dianggap sarat dengan dominasi dan hegemoni Barat. Dalam berbagai literatur pribumisasi pandangan ini direfleksikan dalam beberapa istilah seperti "professional imperialism" (Midgley 1981) dan "cultural imperialism" (Hodge, 1980; Ngan, 1993; Prager, 1985). Midgley (1981) dan pendukung pribumisasi lain juga mempertanyakan relevansi nilai dan prinsip penting yang menjadi landasan filosofis-epistemologis pekerjaan sosial seperti

# PENDEKATAN DAN STRATEGI ALTERNATIF PEMBANGUNAN INDONESIA

Pajar Hatma Indra Jaya

## Pendahuluan

Jim Ife dan Frank Tesoriero (2008: 4) mengatakan sejak tahun 1980 negara kesejahteraan menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa ia sedang mengalami periode krisis karena ketidakmampuan dari negara-negara penganut negara kesejahteraan untuk membiayai kebutuhan jaminan sosial penduduknya. Hal ini terjadi karena inefisiensi dalam program-programnya. Tahun 2012, terjadi krisis ekonomi di Eropa yang dimulai dari Yunani. Krisis ini terjadi akibat hutang yang terlalu besar dari Yunani karena inefisiensi anggaran untuk subsidi, gaji pegawai, dan praktik korupsi. Salah satu yang memperparah krisis ini adalah konsep *welfare state* berupa jaminan sosial yang mahal dan memanjakan masyarakat sehingga ketika ada ide penghematan dengan mengurangi fasilitas jaminan sosial, masyarakat menjadi reaktif untuk menolaknya. Jangankan inefisiensi dan masalah yang sama terjadi di Indonesia.

Dalam dunia pembangunan (pengembangan) masyarakat (*community development/comdev*) di Indonesia, khususnya pengentasan kemiskinan, ada inefisiensi anggaran yang menunjukkan bahwa pilihan program *comdev* yang sedang dijalankan pemerintah tidak tepat. Argumen ini muncul ketika membandingkan data anggaran yang telah dikururkan pemerintah dengan tingkat keberhasilan program pengurangan angka kemiskinan. Pada tahun 2013 pemerintah menganggarkan 106,8 triliun (<http://kominfonewscenter.com>) untuk program pengembangan masyarakat (antara lain untuk Program Keluarga Harapan Rp. 2,9 triliun, PNPM Mandiri Rp 13,4 triliun), namun hasilnya angka

kemiskinan malah bertambah 210.010 jiwa pada tahun 2014. Data ini berasal dari BPS, namun berbeda dengan data yang disampaikan Suryamin (Kepala BPS) ke media on line yang mengatakan tingkat kemiskinan Indonesia menurun dari 28,60 menjadi 28,28 juta jiwa (berkurang 320.000 jiwa) (<http://www.voaindonesia.com>. Lihat juga <http://ekbis.rmol.co/read/2013>). Sedangkan pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp 135 trilyun (Kompas, 30 September 2014). Anggaran pemerintah pada tahun 2013 sejumlah 106,8 trilyun tersebut merupakan jumlah yang sangat banyak, sebagai gambaran PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bantul pada tahun 2013 hanya 226,4 M, sedangkan pendapatan totalnya 1,5 trilyun (terdiri dari PAD, bagi hasil, dana perimbangan, DAK, DAU, dan pendapatan yang lain) (<http://www.bantulkab.go.id/berita/1983.html>). Jika dana penanggulangan kemiskinan dibelikan mobil "rakyat" maka akan diperoleh 1.068.000 juta mobil yang bisa dibagi kepada keluarga miskin. Jika keluarga miskin tersebut dikumpulkan dalam satu daerah dan membuat pemerintahan daerah sendiri, dengan anggaran seperti Kabupaten Bantul, maka dimungkinkan terbentuk 71 kabupaten.

Data pengurangan angka kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I  
Pengurangan Angka Kemiskinan di Indonesia 2012-2014

No	Tahun	Angka Kemiskinan (dalam Jiwa)	Selisih angka kemiskinan (dlm jiwa)	Garis Kemiskinan
1	2014	28.280.010	Bertambah 210.010	Rp 302.735
2	2013	28.070.000	Berkurang 520.000	Rp 271.157
3	2012	28.590.000		Rp 258.911

Diolah dari: <http://www.bps.go.id>, laporan berjudul *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013* dan laporan berjudul *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2014*.

Dari data tersebut muncul pertanyaan, siapa yang

bertanggungjawab atas "kebodohan" pengelola program pengentasan kemiskinan (*comdev*) sehingga hasil programnya lebih buruk daripada jika dana pengentasan kemiskinan langsung dibagi ke masyarakat. Sebagai ilustrasi, garis kemiskinan tahun 2014 adalah Rp 302.735 dan klaim penurunan kemiskinan tahun 2014 (versi kepala BPS) adalah 320.000 orang, maka kebutuhan agar tidak dianggap miskin untuk 320.000 jiwa adalah  $(Rp\ 302.735 \text{ (garis kemiskinan)} \times 12 \text{ bulan (Rp } 3.632.820)) \times 320.000 \text{ orang} = Rp\ 1,16 \text{ trilyun}$ . Jika pemerintah punya dana 13,4 trilyun saja (Program PNPM Mandiri) maka harusnya pengentasan kemiskinan bisa berkurang lebih dari 10 kali lipat dari kondisi saat ini dengan cara membagi-bagikan uang secara langsung (menggaji orang miskin), tanpa memikirkan program *poverty reduction*. Data ini menunjukkan bahwa program pengembangan masyarakat yang ditempuh pemerintah saat ini tidak efektif.

Fenomena di atas tidak terlalu berbeda dengan temuan Eny Haryati (2003) ketika memeriksa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia mulai awal Indonesia merdeka sampai masa reformasi. Ada korelasi antara sistem pemerintahan yang dipilih dengan alokasi anggaran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, semakin demokratis suatu pemerintahan maka anggaran yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan semakin besar dan berlaku sebaliknya. Namun anggaran yang besar dari pemerintah tidak selalu diikuti efektifitas dan efisiensi program dalam mengentaskan kemiskinan (Haryati, 2003). Anggaran yang besar tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Dengan demikian muncul pertanyaan, bagaimana strategi yang paling tepat untuk memanfaatkan anggaran pengurangan kemiskinan sehingga hasilnya efektif dan efisien.

#### Peran Pemerintah dalam Pengembangan Masyarakat

Pemerintah sebagai pengejawantahan dari negara merupakan aktor yang kuat dan potensial karena punya sumber dana yang besar untuk melakukan pengentasan kemiskinan, namun demikian di banyak cerita negara gagal untuk mewujudkannya. Tania Murray Li dalam bukunya *The Will to Improve: Governmentality, Development, and The Practice of Politics* (2007) memaparkan bahwa ada jarak yang lebar antara apa yang diniatkan (kehendak untuk memperbaiki) dengan apa yang kemudian benar terjadi dalam sejarah pembangunan di Indonesia. Niat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah pada banyak

peristiwa justru membawa kesengsaraan yang berkepanjangan dan menghasilkan persoalan-persoalan baru di masa depan. Tania Li mengambil contoh pembangunan dengan program transmigrasi, program ini mampu meningkatkan pendapatan, namun di masa sekarang program ini turut andil dalam menciptakan kesenjangan dan pertikaian sosial.

Di era yang lebih baru, niat baik pemerintah untuk memperbaiki ternyata juga masih menimbulkan masalah. Pada tahun 2010 Merapi mengalami letusan hebat yang mengakibatkan beberapa dusun hangus terbakar karena terjangan awan panas dan lahar dingin. Banyak orang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan yang utamanya sebagai petani. Persoalan ini dirasakan pemerintah dan direspon dengan program perlindungan sosial berupa penyediaan hunian sementara (huntara) dan pembagian jatah hidup. Selain itu pemerintah juga memunculkan program pengembangan ekonomi lewat budidaya lele agar petani tetap mempunyai pekerjaan.

Setiap satu Kepala Keluarga (KK) pengungsi mendapat bantuan terpal sebagai bahan membuat kolam lele berukuran 6 meter x 4 meter, 30 kilogram pelet untuk pakan, dan 2.400 ekor bibit lele (www.travel.kompas.com 20 Februari 2011). Agar usaha dapat berjalan baik maka dilakukan pengelompokan dalam Kelompok Usaha Bersama (Kube) ternak lele. Kendati sudah mendapat penyuluhan dan didampingi petugas, namun beberapa ekor lele mati karena pengungsi tidak berpengalaman dalam ternak lele menggunakan terpal. Beberapa orang juga lebih suka mencari uang dengan menambang pasir karena hasilnya lebih pasti.

Tiga bulan berselang semua pengungsi panen lele, namun akibat panen lele secara serentak menyebabkan harga lele turun. Lele yang sebelumnya dijual Rp 16.000 per kilogram, tiba-tiba harganya menjadi Rp 8.000 karena lebih banyak penawaran daripada permintaan. Beberapa kelompok untung Rp 50.000 selama 3 bulan dan beberapa kelompok yang lain membiarkan lenyanya tetap di kolam. Akibat dari turunnya harga lele secara drastis tidak hanya merugikan kelompok ternak lele di Merapi, namun kelompok ternak lele di Bantul yang sudah mapan juga mengalami kebangkrutan. Dari kasus ini dapat dikatakan niat baik pemerintah untuk mengembangkan masyarakat tanpa dilakukan dengan pembacaan situasi yang tepat dapat menghancurkan usaha lain yang telah mapan.

Apakah fakta-fakta tentang ketidakberhasilan negara dalam mengentaskan dan menyejahterakan masyarakat melahirkan

kesimpulan bahwa negara tidak perlu turut berperan dalam pengembangan masyarakat? Ahmad Erani Yustika (2003) sampai menulis buku berjudul *Negara Vs Kaum Miskin*. Dalam konteks Indonesia, pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak dapat mengabaikan peran pemerintah. Dua tugas pertama negara menurut UUD adalah untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian membicarakan penanganan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari peran negara, hanya bagaimana pilihan strategi pemerintah yang tepat untuk mengatasinya perlu dikaji secara lebih mendalam.

### Pilihan Pendekatan

Amartya Sen dalam pengantar bukunya yang berjudul *The Idea of Justice* (Allen Lane, 2009) memberikan pemahaman tentang pendekatan pembangunan dan keadilan lewat kisah sebuah seruling. Seruling dalam kajian *community development* diibaratkan sebagai kelangkaan asset atau dana dari program pemberdayaan/pengembangan masyarakat. Dalam cerita tersebut, Sen meminta kita membayangkan menemukan sebuah seruling dan karena yang menemukan amanah maka seruling tidak dimiliki sendiri, namun diumumkan ke masyarakat agar dimiliki oleh orang yang paling tepat. Munculah tiga orang, Anne, Bob, dan Carla, yang membawa proposal untuk mendapatkan seruling.

Anne merasa berhak mendapatkan seruling karena ia merupakan orang yang paling pandai memainkan seruling dan dengan memainkannya akan banyak orang yang terhibur dan mendapatkan manfaat. Bob merasa lebih berhak karena ia merupakan orang yang paling menderita, sejak kecil ia tidak punya mainan sama sekali dan jika ia mendapatkan seruling tersebut maka seruling tersebut merupakan mainan pertamanya kendati ia tidak bisa memainkannya. Carla mengajukan proposal lebih berhak mendapatkan seruling karena ia merupakan pembuatnya. Dengan melihat tiga proposal tersebut, kepada siapa seruling atau dana pemberdayaan/pengembangan paling layak diberikan?

Pendekatan pemerintah pasca reformasi sampai saat ini lebih condong ke arah keberpihakan kepada Bob. Pendekatan ini menekankan bahwa alokasi distribusi anggaran negara yang besar harus diberikan kepada si-miskin (*pro poor budget*). Dana publik harus diberikan kepada kaum yang paling miskin dan termarginalkan terlebih dahulu. Menurut strategi ini dibutuhkan

kebijakan afirmatif terhadap orang-orang paling rentan agar mereka berdaya dan mereka harus didahulukan kendati penerima dana tidak punya ketrampilan untuk menggunakannya. Strategi ini termasuk dalam model pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dasar (*basic need*) (Tjokrowinoto, 1995: 26; Muslim, 2007).

Dilihat dari ketepatan sasaran, pendekatan ini paling presisi karena penerima dana pengentasan kemiskinan terdiri dari orang-orang miskin. Mereka langsung mendapat manfaat karena dilibatkan dalam program. Strategi ini dimulai dengan langkah pengorganisasian masyarakat miskin dalam kelompok-kelompok yang kemudian didampingi dan diminta untuk membuat proposal usaha. Salah satu ciri strategi ini adalah mensyaratkan anggota kelompok minimal 75% atau bahkan 100% anggotanya adalah rumah tangga miskin. Contoh intervensi ini antara lain Program Kube (Kelompok Usaha Bersama) Kementerian Sosial dan CDMK (*Community Development Mengentaskan Kemiskinan*). Model intervensi yang dilakukan menurut UU No 11 tahun 2009 juga masuk dalam pendekatan ini karena hanya diberikan kepada orang-orang yang menyanggah masalah kesejahteraan sosial.

Dilihat dari hasil akhir, proses pemberdayaan ini seringkali berjalan lambat dan tidak berkembang. Dalam banyak kasus kelompok sasaran akhirnya bosan karena usaha yang mereka geluti tidak secara cepat mampu memberikan kontribusi ekonomi bagi pendapatan keluarga. Hasil yang kecil dibanding dengan tekanan kebutuhan yang semakin besar seringkali menyebabkan para anggota kelompok menjual aset-aset produksi bantuan negara atau lembaga donor tersebut. Di sini terjadi pengkerdilan usaha yang makin hari asetnya makin berkurang dan akhirnya habis tanpa sisa. Proses tersebut salah satunya disebabkan karena dalam kelompok miskin tidak ada orang yang berpengalaman dalam pengembangan usaha.

Strategi kedua adalah strategi (pendekatan) tidak langsung-Model Anne, yaitu intervensi pemberdayaan/pengembangan yang sasaran pertamanya tidak harus masyarakat marjinal atau masyarakat miskin. Titik tekannya adalah intervensi pada orang yang mempunyai potensi besar terutama soal kecepatan untuk berkembang dan bermanfaat bagi orang lain. Pendekatan ini menekankan pada munculnya pertumbuhan karena dengan munculnya pertumbuhan akan ada rembesan ke bawah (*trickle down effect*) yang akan membawa perbaikan kesejahteraan masyarakat,

termasuk masyarakat miskin.

Jika ada 100 orang yang akan diberdayakan, cukup diambil satu atau dua orang terlebih dahulu. Dengan konsentrasi pada sedikit orang maka perhatian dapat terkonsentrasi penuh. Ketika satu atau dua orang ini telah berhasil maka dia dapat diminta untuk turut serta membina pengembangan masyarakat di sekitarnya. Belajar dari perkembangan sentra-sentra industri di beberapa tempat nampak bahwa kemunculannya dimulai dari satu orang yang punya motivasi berusaha yang tinggi atau dalam bahasa David McClelland orang-orang yang punya virus N-Ach (*need of achievement*) yang tinggi. Dengan motivasi berprestasi yang tinggi mereka akhirnya berhasil dan keberhasilan inilah yang menggerakkan perekonomian komunitas. Keberhasilan ini akan membawa konsekuensi permintaan tenaga kerja dan bahan baku kepada masyarakat sekitar, bahkan memunculkan toko-toko kecil yang menyediakan kebutuhan karyawan. Di banyak kasus, tenaga yang telah bekerja kepada orang pertama ini bisa dimandirikan atau keluar sendiri untuk meniru sehingga muncullah usaha-usaha sejenis dalam satu kawasan. Inilah yang disebut rembesan ke bawah (*trickle down effect*).

Dalam logika *trickle down effect* akan muncul perubahan secara otomatis tanpa digerakan akan muncul pertumbuhan. Dilihat dari munculnya sentra-sentra usaha di Yogyakarta nampak bahwa perkembangan dimulai dari satu orang (pendekatan individu). Bahkan individu tersebut tidak harus berasal dari keluarga miskin. Meskipun mereka tidak semuanya berasal dari kelompok miskin, namun kontribusi mereka untuk mengentaskan kemiskinan cukup besar. Jadi pengentasan kemiskinan dan pengembangan masyarakat tidak harus dimulai dari orang-orang miskin. Namun perlu diberi catatan, strategi-pendekatan pengembangan tidak langsung ini punya masalah pada proses pemerataan pembangunan. Meskipun demikian dalam kasus munculnya sentra-sentra usaha di DI Yogyakarta pemerataan dapat teratasi karena adanya proses peniruan (imitasi) di masyarakat.

Strategi model Carla merupakan strategi *top down* yang paling ekstrim, karena *reward* dan kebijakan dioreintasikan kepada orang yang menghasilkan seruling atau orang-orang yang paling banyak berkontribusi menghasilkan pendapatan bagi negara. Dengan demikian kebijakan diarahkan kepada kebutuhan para pengusaha yang biasanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur transportasi sehingga akses produksi dan distribusi produk-produk



dari pengusaha semakin lancar. Dalam strategi ini pemerintah memprioritaskan pada pembangunan jalan, jembatan, ataupun dermaga.

Strategi langsung model Bob cocok digunakan untuk program-program yang berupa rehabilitasi sosial, jaminan ataupun perlindungan sosial, namun cukup sulit diterapkan dalam program yang sifatnya pemberdayaan/pengembangan masyarakat. Sebaiknya model Anne cocok untuk program-program yang termasuk dalam kluster pemberdayaan/pembangunan masyarakat.

### Inti Plasma Sebagai Pendekatan Hibrida

Jika kita memeriksa model ataupun strategi intervensi sosial negara untuk mengatasi kemiskinan dari era kemerdekaan sampai sekarang sesungguhnya hampir semua pendekatan didatangkan dari barat. Paradigm *top down* model Rostow yang diterapkan di masa Orde Baru berasal dari barat, demikian juga sebaliknya paradigm pembangunan *bottom up* mulai dari PRA, PAR, empowerment, Aset Base Community (ABC) Development juga berasal dari Barat. Dengan demikian sesungguhnya darimana konsep itu berasal bukan menjadi masalah asalkan dapat efektif dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan. Persoalannya pendekatan-pendekatan tersebut sampai saat ini tidak mampu menanggulangi kemiskinan secara ampuh, apakah menemukan pendekatan yang paling tepat untuk pengembangan masyarakat di Indonesia memang sebagai suatu "*mission impossible*". Dibutuhkan adaptasi konsep-konsep tersebut atau bahkan melakukan perpaduan konsep yang ada untuk diambil sisi keunggulannya sehingga muncul pendekatan hybrid.

Strategi (pendekatan) tidak langsung-Model Anne dengan memberikan titik tekan intervensi pada orang yang mempunyai potensi besar terutama soal kecepatan untuk berkembang dan bermanfaat bagi orang lain merupakan pilihan yang paling tepat untuk program pengembangan masyarakat. Namun pendekatan ini harus dipadukan dengan pendekatan model Bob dengan mengikutsertakan orang-orang miskin dalam program. Model ini memberikan *afirmatif action* dengan cara dana bantuan pengembangan akan diberikan kepada orang yang potensi berkembang, asalkan ia melibatkan dan memberdayakan orang dari kelompok miskin dengan jalan transfer pengetahuan kepada mereka. Model ini dalam system perkebunan dapat disebut sebagai strategi kemitraan inti plasma atau dalam konsepsi Orde Baru

disebut pola bapak angkat.

Pada dasarnya pola ini merupakan refleksi kesediaan pihak yang mampu untuk membantu pihak lain yang kurang mampu (pihak yang memerlukan pembinaan). Oleh karena itu, pada hakikatnya pola pendekatan ini merupakan wujud rasa kepedulian pihak yang besar terhadap yang lebih kecil. Pihak yang mampu (bapak) merupakan orang-orang yang punya keahlian untuk "memainkan seruling" sehingga memberi manfaat kepada orang-orang miskin.

Proses pengembangan/pembangunan masyarakat dalam pendekatan Inti Plasma dibagi dalam empat fase, yaitu:

1. *Fase pertama*, pemerintah berperan sebagai yuri yang memeriksa, menilai, dan memberi masukan konsep proposal dari pola bapak angkat yang diajukan masyarakat. Sebelum masuk tahap penilaian, akses informasi akan adanya kompetisi proposal ini harus dibuka lebar, semakin banyak orang tahu maka akan semakin banyak proposal yang masuk dan semakin inovatif konsep yang ditawarkan.
2. Setelah diperiksa, tahap selanjutnya (*fase kedua*) proposal tersebut diuji komitmennya terutama aspek fisibel terkait pelaksanaan program. Fase pertama dan kedua ini lebih melihat kesadaran dari masyarakat yang hendak diberdayakan.
3. Proses selanjutnya (*fase ketiga*) jika pemerintah merasa proposal yang diajukan tersebut baik maka dilakukan pemberian kapabilitas (*capacity development*) dan pemberian daya. Pemberian kapasitas secara sederhana dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas seseorang yang biasanya dilakukan lewat pelatihan (*live skill*). Sedangkan pemberian daya merupakan pemberian stimulan di luar aspek manusia (SDM) yang antara lain berupa pemberian modal usaha.
4. *Fase keempat* dilakukan pembangunan jaringan untuk memasarkan produk kemitraan ke masyarakat luas. Dalam hal ini pemerintah dapat memainkan peran secara struktural lewat kebijakan atau memberi teladan untuk percepatan program pengembangan masyarakat. Sebagai contoh di Bantul, Bupati mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Nomor 535/6671 tertanggal 27 Desember 2013 yang meminta seluruh rapat di lingkungan Pemkab Bantul wajib menyuguhkan geplak sebagai salah satu menu. Dengan surat edaran ini maka pangan tradisional (gepalak) yang mulai terdesak dari pangan dengan bahan baku dari luar negeri mulai mendapat tempat

lagi karena perlindungan pemerintah.

Proses transfer pengetahuan di mana plasma/anak belajar pada inti/bapak inilah yang perlu didampingi oleh pengembang masyarakat (pekerja sosial) sehingga plasma mampu berdaya dan mandiri, tidak lagi mengalami ketergantungan dengan Sang Inti. Jika satu rekayasa ini berhasil maka akan dapat disebar ke daerah lain. Strategi ini dimasa kolonial disebut sebagai strategi *olie vlek* atau percikan minyak. Dalam strategi ini, dilakukan *demonstration plot* yang memberikan model *best practice* keberhasilan program yang akan ditiru sehingga nantinya menyebar luas di masyarakat. Strategi ini sebenarnya juga diadopsi di awal masa kemerdekaan Indonesia (1952) dengan nama "Rencana Kesejahteraan Kasimo" (*Kasimo Welfare Plan*) (Tjokrowinoto, 2012: 34).

### Ukuran Keberhasilan Program Pengembangan Masyarakat

Di bagian pendahuluan dari tulisan ini memperlihatkan secara tegas bahwa parameter utama keberhasilan program pembangunan/pengembangan masyarakat adalah mengurangi angka kemiskinan. Ada dua tipe orang atau rumah tangga yang dinyatakan tidak miskin lagi, yaitu model pengurangan kemiskinan yang nyata dan pengurangan kemiskinan yang semu. Model yang pertama terjadi ketika orang dikategorikan tidak lagi miskin ketika terjadi peningkatan pendapatan sehingga sebuah keluarga mempunyai daya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Model yang kedua orang dikatakan tidak miskin lagi tanpa ia mengalami peningkatan pendapatan, hal ini hanya terjadi karena pemerintah berhasil menghilangkan atribut kemiskinan non-pendapatan, misalkan pemerintah membuat program bedah rumah sehingga lantai rumahnya berkeramik, atapnya dari genteng, mempunyai listrik, punya sumur, namun pendapatannya tidak berubah (Pajar Hatma Indra Jaya, 2011: 243). Tentu kondisi yang ideal terkait dengan terhapusnya kemiskinan terjadi ketika ada kenaikan pendapatan yang diikuti pemanfaatan dana tersebut untuk perbaikan infrastruktur (lantai, dinding, atap rumah-atribut sekunder kemiskinan).

Secara lebih operasional keberhasilan program pengembangan masyarakat akan nampak dari proses perbaikan yang nampak dari indikator:

#### 1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar

Tujuan pertama program intervensi sosial, baik yang berbentuk

pengembangan, perlindungan sosial, jaminan sosial, ataupun pemberdayaan masyarakat adalah terpenuhi kebutuhan dasar. Maslow menamainya sebagai kebutuhan *physiological* yang berupa pangan, sandang, kesehatan sebagai unsur utama kebutuhan dasar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar maka proses pengembangan diharapkan dapat memberikan ketrampilan (*skill*) sehingga dengan peningkatan ketrampilan diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan konsumsi keluarga, yang ukuran standarnya adalah 2100 kalori setiap hari.

#### 2. Munculnya Kemandirian

Kemandirian secara umum dapat dikatakan sebagai kondisi yang tidak tergantung dengan orang lain atau institusi manapun. Program pengembangan masyarakat dikatakan berhasil jika komunitas (plasma) yang dahulu tergantung pada lembaga lain (inti) saat ini mampu melakukan aktivitasnya sendiri. Dilihat dari aspek ekonomi muncul kesadaran untuk mempunyai sifat berbagi (filantropi; partisipasi) dan tidak tergantung pada dana pinjaman usaha. Dalam konsep Islam terjadi transformasi dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*), dari yang diberdayakan menjadi yang turut memberdayakan orang lain, dari yang meminjam menjadi jadi penabung atau pemberi pinjaman.

#### 3. Keberlanjutan (*sustainable*) dan Perbaikan Program

*Sustainable* dimaksudkan program akan berlangsung terus menerus, berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan usahanya. Kegiatan yang *sustainable* akan selalu meningkat dan tidak mengalami stagnasi (jalan di tempat).

Puncak dari indikator keberhasilan program pengembangan masyarakat adalah tercapainya dasar filosofis pemberdayaan, yaitu *helping people help themselves* (membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri) atau menumbuhkan kemandirian.

#### Penutup

Ulasan di atas menunjukkan bahwa dalam kajian *community development* tidak perlu dibedakan pendekatan barat dan Indonesia, toh meskipun saling bertolak belakang, sejak dulu teori-teori pembangunan di Indonesia diambil dari barat. Namun karena hasil penerapan strategi pembangunan tersebut tidak efektif dan efisien maka perlu selalu dilakukan reformulasi strategi sehingga menghasilkan formula baru yang lebih unggul (hibrida). Hasil pembacaan saya terhadap data di lapangan dan strategi

pembangunan yang pernah dipilih oleh pemerintah menghasilkan pendekatan inti plasma yang merupakan proses percampuran antara pendekatan pemberdayaan selama ini yang hanya diperuntukan bagi orang miskin (model Bob) dengan memadukan dengan pendekatan model Anne yang lebih memilih asas kebermanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yustika, Ahmad Erani, (2003). *Yustika, Negara Vs Kaum Miskin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sen, Amartya (2009). *The Idea of Justice*, Allen Lane, London.
- Muslim, Aziz (2007). Pendekatan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Yogyakarta, hal 1, Vol VIII, No 2, Desember 2007.
- Haryati, Eny, (2003). "Pembangunan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Diakronis Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Karakter Kebijakan Pembangunan Masyarakat Desa dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia," Disertasi Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Santoso, Hery dan Pujo Semedi (2012), *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan Di Indonesia*, Marjin Kiri, Tangerang.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero (2008). *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kompas, *Subsidi BBM Lebih Besar daripada Kesehatan*, 30 September 2014.
- Tjokrowinoto, Moeljarto (2012). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Jaya, Pajar Hatma Indra, (2011). Kehidupan Setelah Dinyatakan Tidak Miskin, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 10, No 3, September 2011, B2P3KS, Yogyakarta.
- Adams, Robert (2003). *Social Work and Empowerment*, Palgrave Macmillan, UK.

## Sumber Internet:

- <http://kominfonewscenter.com>, *Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 2013 Rp106,8 Triliun, Tanggap Darurat Bencana Rp4 Triliun*, 29 Agustus 2012.
- <http://www.voaindonesia.com>, *BPS: Tingkat Kemiskinan Indonesia Menurun*, 28 Oktober 2014.
- <http://www.bantulkab.go.id/berita/1983.html>, *PAD Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebesar 226,4 M*, 20 Februari 2014.
- <http://travel.kompas.com>, *Bibit Lele Bagi Pengungsi Merapi*, 20 Februari 2011.
- <http://www.bps.go.id>, *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013*.
- <http://www.bps.go.id>, *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, Maret 2014*.